

# KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN AMERIKA DALAM MENANGANI JOINT VENTURE DI PT. FREEPORT TAHUN 2015-2020

*Indonesian Government Cooperation And Amerika In Handling Joint Venture At Pt. Freeport Year 2015-2020*

Nitra Aderiani Damanik<sup>1</sup>, Ibnu Zulian<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama

<sup>1,2</sup>Universitas Potensi Utama, K.L.Yos Sudarso KM 6,5 No.3A Tj.Mulia – Medan

Email : <sup>1</sup>nitradamanik97@gmail.com, <sup>2</sup>ibnuzulian45@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perusahaan PT. Freeport dalam mengenai penanaman modal yang merupakan sebuah kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2015-2020. Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang PT Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan di Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dan dapat dianggap telah melakukan eksploitasi terhadap Indonesia, baik dalam hal sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Pendapatan yang di dapat oleh Freeport di Indonesia sudah dianggap sebagai yang terbesar dibandingkan dengan tambang Freeport di negara lain. Pada tahun 2016, pendapatan Freeport tercatat sebesar US\$ 3,29 miliar atau setara dengan 44 triliun rupiah, dan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya kesepakatan ini, maka Indonesia akan menguasai 51 persen saham Freeport yang sudah lama beroperasi di Papua, Yang pada Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Kerja sama Freeport yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat dengan pemerintahan Soeharto yang ditandatangani tahun 1967 lalu ditafsirkan sejarawan Rusdy Hoessein Ph.D sebagai hal yang tidak terlalu jelas dan lebih merupakan agenda politik luar negeri AS, PT Freeport Indonesia memiliki perkembangan yang sangat cemerlang, PTFI telah berinvestasi sebesar US\$ 7,7 Miliar dalam infrastruktur Indonesia, dalam kasus ini menunjukkan bahwa konsep Liberalis memandang bahwa suatu perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan suatu Negara, karena pasar yang mendominasi dalam perekonomian, adanya kerjasama antara PTFI dengan Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antar Negara dilakukan untuk sama sama memperoleh keuntungan.

*Kata kunci : PT.FREEPORT Indonesia, INALUM, Saham Perusahaan, Kerjasama Internasional*

## ABSTRACT

This study aims to find out about the efforts of the Indonesian government in dealing with PT. Freeport in regarding capital investment which is a collaboration between the Government of Indonesia and the United States of America in 2015-2020. In 2017 President Joko Widodo (Jokowi) stated that if the state-owned company (BUMN) holding PT Inalum had reached an agreement with Freeport McMoran regarding the acquisition of a 51 percent stake in PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia is a mining company in Indonesia that has been operating in Indonesia since 1967 and can be considered to have exploited Indonesia, both in terms of natural resources and human resources. The income that Freeport earns in Indonesia is considered the largest compared to Freeport mines in other countries. In 2016, Freeport's revenue was recorded at US \$ 3.29 billion, equivalent to 44 trillion rupiah, and also increased from the previous year. The existence of Freeport With this agreement, Indonesia will control 51 percent of

*Freeport shares operating in Papua. Previously, Indonesia only owned 9.36 percent of shares in companies from the United States (US). The collaboration between Freeport, which is headquartered in Phoenix, Arizona, United States of America, and the Soeharto government which was signed in 1967 was interpreted by historian Rushdy Hoesein Ph.D as not very important. clear and more of a US foreign policy agenda, PT Freeport Indonesia has a very bright development, PTFI has invested US \$ 7.7 billion in Indonesian infrastructure, in this case it shows that the Liberalist concept views that a company can influence the policies of a country, because dominating market in the economy, the cooperation between PTFI and Indonesia shows that relations between countries are carried out to mutually benefit.*

*Keywords: PT. FRREEPORT Indonesia, INALUM, Company Shares, International Cooper*

## 1. PENDAHULUAN

PT. Freeport Indonesia Merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. PT. Freeport Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT. Mcmoran yang berpusat di Amerika Serikat, Hubungan kerja sama ini dimulai Setelah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto, setelah mengalami peralihan Presiden pemerintah baru mengambil kebijakan untuk memulai langkah baru agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi.[1] Indonesia dan Amerika melakukan kerjasama bilateral dengan Adanya hubungan bilateral ini merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan yang dilakukan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka saling bergantung pada kepentingan nasionalnya yang memiliki tujuan dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Didalam kerjasama ini pemerintah harus memiliki tujuan yaitu tujuan Nasional Dengan tujuan nasional ini yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Menurut Kusumohamidjoyo didalam tulisannya adalah hubungan bilateral diartikan Suatu bentuk kerjasama yang dilakuakn oleh kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi. PT. Freeport merupakan sebuah perusahaan tambang internasional yang beroperasi di Mimiki dan memiliki kantor pusat di Phoenix Amerika Serikat . Setelah adanya peralihan Pemerintah Indonesia dari presiden pertama yaitu soekarno kepada soeharto, dan setelah kekuasaan pemerintah berada di tangan soeharto beliau bertekad untuk membangun perekonomian Indonesia yang Pada saat itu ekonomi Indonesia memburuk. PT. Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. [2]. Dalam konsep kerjasama internasional, hubungan antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap Negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Indonesia selain mendapat keuntungan terdapat kerugian akibat kerjasama dengan Amerika di PT. Freeport selama beroperasi di Indonesia Freeport sering sekali tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati.

PT Freeport Indonesia sepakat akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022, lalu landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan lagi berstatus Kontrak Karya(KK),Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua untuk memastikan Indonesia menjadi pemilik mayoritas di Freeport. Di samping untuk memberikan hak kepada pemerintah daerah tempat perusahaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10% dari 51% divestasi pengalihan saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur

Utama PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (12/1).n tersebut berdiri. [3] Seperti yang kita ketahui dalam konsep Penanaman Modal asing merupakan suatu investasi yang di investasikan oleh investor asing yang dilakukan atas dasar-dasar dan ketentuan yang telah di tetap oleh suatu Negara dan kesepakatan dalam kerjasama tersebut memiliki keuntungan yang di dapat oleh kedua Negara tersebut. Dalam hal ini Penulis memakai konsep Penanaman modal asing. Penanaman modal atau lebih sering disebut investasi menurut Todaro bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang disebut sebagai investasi. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang biasanya juga disebut dengan penelitian taksonomik, dimana tujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menjabarkan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia di PT. Freeport dalam menangani investasi asing.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (*Library Research*) disertai dengan melihat perkembangan fakta yang kebijakan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai macam sumber berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar dan internet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pertambangan PT.Freeport Indonesia

Sumber : [https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjubi.co.id%](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjubi.co.id%2F)

Negara Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, kultur, dan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya bangsa maritime yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah bukti dari penjajahan berbagai negara lain terhadap bangsa Indonesia selama beratus tahun hal ini membua mereka tergiur dengan potensi wilayah dan sumber daya alam yang ada dan dimiliki oleh Indonesia. Dan kini Bangsa yang terjajah tersebut telah mendapatkan kembali kemerdekaannya hingga hampir tujuh puluh dua tahun. Kerja sama itu tertuang dalam beberapa kesepakatan, salah satunya adalah kontrak karya yang pertama dengan PTFI. Pemerintah Indonesia telah menyetujui kontrak karya tersebut sehingga dapat Freeport memperoleh izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Irian Barat.[4] Berdasarkan konsep Bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Penulis menyimpulkan bahwa kerjasama ini membuat ekonomi Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami krisis perlahan membaik, hampir 50 tahun PT. Freeport berada di Indonesia dan sudah banyak memberikan kontribusi kepada Indonesia.

Kebijakan disvestasi hingga mencapai 51% salah satu proses terlaksananya adalah karena Adanya peningkatan penerimaan Negara. Peraturan ini ditujukan kepada perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan porsi saham secara berkala dan meningkat dari entitas mereka yang berdomisili lokal, Bagi orang Indonesia yang Pertama adalah divestasi memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka jika dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak. Ataupun dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktik ekonomi di Indonesia terkait investasi di bidang pertambangan.[5] Berdasarkan konsep penanaman modal Maka hal ini memungkinkan perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan praktik-praktik bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar di negara ini. Kebijakan divestasi 51% ini sendiri diklaim oleh Presiden Jokowi sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat Indonesia sendiri.

Pada umumnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.[6] Dalam teori Kerjasama internasional penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama ini merupakan sebagai upaya suatu Negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua Negara ini memiliki sebuah Tujuan sebuah kerjasama dengan negara lain yaitu karena didasari dengan adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan Negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Maka menurut penulis Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar Negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Sejak awal pemerintahan Indonesia sudah menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat (AS) terutama sejak Rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia yaitu paruh kedua decade 1960an di era pemerintahan Soeharto. Amerika Merupakan sebuah Negara Super power di dunia, Akan tetapi hubungan ekonomi kedua pihak tidak cukup berkembang dibandingkan dengan hubungan ekonomi AS dengan negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Australia. Dominasi aspek politik dan strategis dalam hubungan kedua negara mengakibatkan AS dan Indonesia kurang mengembangkan potensi-potensi ekonomi diantara keduanya. Sejak tahun 2009 AS juga dilanda krisis ekonomi. Yang menjadi fokus kerja sama adalah sektor ekonomi.[7]. Dalam konsep kepentingan Nasional tulisannya mengenai kepentingan nasional Hans J. Morgenthau untuk yang pertama kali menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional dilakukan melalui pendekatan realis di mana pada saat itu dia menyatakan bahwa kebijakan nasional dalam pernyataannya secara obyektif kekuasaan, terdiri dari kebutuhan minimum yang pasti mempertahankan keadaan, politik, dan identitas budaya negara dan sebuah variabel, elemen yang kurang berjangka panjang dan kurang esensial sebagai turunan dari tekanan domestik dan permintaan kelompok-kelompok kepentingan. Upaya peningkatan hubungan kedua belah pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir karena dorongan Duta Besar Indonesia yang

baru dan upaya AS untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya. Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara menandatangani the US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement (US-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Dari kutipan tersebut penulis menyimpulkan bahwa ada upaya Pemerintah Indonesia dan AS untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara ditandai dengan adanya pembentukan beberapa forum untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama ekonomi diantara kedua negara.

Indonesia juga mendapatkan Keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah RI sebagai hak dari kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia tersebut merupakan bagian dari sumber pendapatan negara. Pendapatan negara ini akan menjadi sumber dari keuangan negara. Pada Pasal 1 angka (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber keuangan negara yang berasal dari penanaman modal asing ini sudah seyogyanya diatur regulasinya sedemikian rupa, berdasarkan prinsip keadilan antara pihak yang terkait, sehingga menghasilkan manfaat yang besar terutama bagi Negara dan masyarakat terdampak dari kegiatan penanaman modal asing tersebut. [8] Menurut Panjaitan (2003), Pada umumnya dalam konsep Penanaman Modal Asing (PMA) adalah transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian. Berdasarkan kutipan tersebut Maka Tidak semua kegiatan usaha bisa dilakukan sendiri, karena berbagai alasan, baik alasan teknis produksi, alasan penguasaan pasar, maupun semata-mata alasan keuangan. Maka beberapa orang atau beberapa pihak bersama-sama mendirikan satu perusahaan, baik dengan pihak-pihak dalam satu negara bahkan lintas negara. Pada era globalisasi seperti sekarang, sudah biasa melihat perusahaan patungan dengan pemegang saham yang berasal dari banyak negara. Karena itu sudah menjadi makin susah untuk menyebut negara asal mana yang mendominasi satu perusahaan. Sebelumnya seperti yang sudah banyak diketahui bahwa pada masa era pemerintahan soeharto Indonesia dan PT. Freeport sudah melakukan kerjasama yang pada saat itu Indonesia memang sedang mengalami masa sulit, hal ini lah yang membuat soeharto melakukan langkah dengan melakukan kontrak untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Ketika era pemerintahan Jokowi pemerintahannya membuat kebijakan bahwa PT Freeport Indonesia dalam negosiasi pengalihan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Setelah dilakukan proses negoisasi yang memakan waktu jangka panjang Pemerintah Indonesia lalu menemukan titik terang dari hasil negosiasi antara.

Kerjasama yang telah di sepakati oleh PT. Freeport dan Indonesia sesuai keinginan masing-masing aktor. Negosiasi antara pemerintah dan Indonesia telah berlangsung beberapa tahun hingga tercapainya sebuah kesepakatan. Kerjasama ini Sampai Pada titik awal negosiasi jadi kedua aktor Negara tersebut bersikap saling melawan hingga kesepakatan tidak tercapai jadi dalam perkembangan dan kebijakan bahwa negoisasi panjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah sampai saat ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik hal ini juga dapat menjadi acuan jalannya perekonomian Indonesia, negoisasi yang dilakukan antara Indonesia dan Freeport pada era Presiden Jokowi lebih bersifat efektif karena dapat memberi keuntungan yang sangat besar kepada kedua belah pihak. Bagi Indonesia sendiri bahwa hasil yang didapat sesuai dengan harapan yang meliputi kepemilikan saham mayoritas, fasilitas smelter, peningkatan pemasukan.[9]

Berdasarkan Teori Negoisasi Jadi Kepemilikan saham dapat mempengaruhi peran Indonesia dalam aktivitas pertambangan Freeport dalam hal pengaturan manajemen, dividen, dan kontrol. Pendapatan dan peningkatan pemasukan bagi Pemerintah Indonesia akan terwujud melalui peningkatan pemasukan pajak, royalti, dividen, dan pemasukan melalui BUMN yaitu PT. Freeport . Bagi Freeport itu sendiri hasil yang diharapkan adalah adanya kepastian usaha yang didapat melalui perpanjangan kontrak. Jadi dalam kasus negosiasi pemerintah melakukan pengalihan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, implementasi yang paling penting dalam pembentukan bargaining power menurut tulisan ini adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Dalam keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah terdapat adanya beberapa faktor dibalik keberhasilan Negoisasi tersebut yaitu Pertama, potensi sumber daya alam di Papua

dan kepastian usaha dan Tambang Grasberg merupakan tambang yang berkontribusi pada pemasukan Freeport. Setelah masa pakai tambang terbuka Grasberg telah habis maka Freeport harus melanjutkan aktivitas pertambangan dengan tambang bawah tanah. Didalam proses eksplorasi atau pengerjaan tambang bawah tanah PT. Freeport telah berinvestas hingga 29 miliar US Dollar dan itu berlaku sampai tahun 2041. Jika dilihat dari segi potensi cadangan tambang bawah tanah Freeport terdiri dari 5 tambang yang memiliki cadangan lebih banyak dari tambang terbuka tersebut . Pertimbangan tersebutlah yang akan membuat Freeport menjadi ragu untuk melepaskan tambang Grasberg. Hal tersebut yang merupakan sebuah kebijakan yang akan membuat Freeport menjadi memiliki kepentingan dalam negosiasi dengan Indonesia, khususnya untuk mendapatkan kepastian usaha dan perpanjangan kontrak telah disepakati oleh pemerintah.

Jadi seperti yang penulis simpulkan bahwa Penerimaan saham tersebut akan sangat merugikan jika Freeport mengambil jalur hukum ke kebijakan internasional. Pada masa era Pemerintahan presiden Jokowi Indonesia lebih bersikap menekan dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi aktivitas utama PT Freeport yaitu pemerintah Indonesia membuat kebijakan larangan ekspor konsentrat tahun 2017. Meskipun dalam kebijakan ini Indonesia bersikap lebih menekan dan agresif, Tetapi Pemerintah Indonesia sendiri masih memberikan keringanan terhadap Freeport dengan memberikan izin ekspor sementara kepada Investor , seperti kebijakan yang telah disepakati Freeport dapat melakukan ekspor dalam kurun waktu tertentu dan dibatasi dengan kuota. Selain memberi tekanan Pemerintah di era Jokowi jumlah frekuensi negosiasi lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan era SBY. Seperti yang telah kita ketahui bahwa PT. Freeport berada di Indonesia sudah berada di Indonesia kurang lebih lima puluh tahun mulai era pemerintahan soerharto. PTFI telah memberikan beberapa kontribusi kepada Indonesia, salah satunya dari segi ekonomi, PTFI telah berkontribusi langsung sebesar US\$ 15,8 miliar dan US\$ 29,5 miliar melalui keuntungan tidak langsung. PT. Freeport juga berperan dalam pembangunan Papua. Sebelum tahun 1967, daerah Timika hanya berupa hutan belantara. Pada tahun 1970 Freeport bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang sekarang menjadi kota Timika. PTFI juga memberikan apresiasi terhadap masyarakat setempat dengan membantu kesejahteraan warga lokal dengan memberi sekitar 30.000 warga lokal pekerjaan di PTFI. Dengan berpedoman pada UU no.24 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Perpu No.1 tahun 2017. Hal-hal berkenaan dengan jumlah divestasi, kewajiban pemegang kontrak karya, dan hak pemegang kontrak karya yang tertuang dalam Perpu ini menjawab renegotiasi yang sempat diadakan bersama PTFI pada 2014 silam. Pemerintah mewajibkan pihak pemegang kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika masih ingin memperoleh izin ekspor, pihak tersebut harus memenuhi kewajiban pemegang IUPK. pada saat pemerintahan Jokowi, pemerintah menegaskan bahwa saham 51% kepada Indonesia di PT. Freeport Indonesia adalah ketika pemerintah mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2014. Pada saat itu PT. Freeport sendiri tetap ingin divestasi sebesar 30% dan kewajiban divestasi itu hanya berlaku dan diwajibkan kepada izin usaha pertambangan khusus(IUPK). Seorang pengamat energy dari Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan bahwa pemerintah sudah terlambat mendapatkan keuntungan dari divestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

PT. Freeport merupakan sebuah perusahaan Multinasional yang identik akan sengketanya dengan Indonesia. CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tidak bersedia mengubah izinnya menjadi IUPK. Pihak Freeport keberatan dengan peningkatan nilai divestasi yang diatur dalam Perpu No.1 tahun 2017 karena mereka diminta membayar lebih tanpa ada jaminan ekspor jangka panjang dari pihak Indonesia. Dan pada saat kesepakatan itu dilakukan PT. Freeport bermaksud mengajukan arbitrase bila selama 120 hari masalah ini tidak diselesaikan. Menurut UU RI No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Mereka beranggapan kontrak karya yang telah ditandatangani pada tahun 1991 merupakan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan arbitrase pada pemerintah Indonesia. Pada kontrak tersebut, tertulis bahwa Freeport memiliki izin ekspor hingga tahun 2021 dan bisa diperpanjang hingga tahun 2041. Pemerintah berhak menentukan apakah KK hendak diperpanjang atau tidak. Apabila kerja sama diperpanjang, kerja sama tersebut harus berlandaskan peraturan yang berlaku dalam negara.Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan. Menurut Salim H.S(2017) kontrak

karya adalah sebuah perjanjian yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing yang merupakan sebuah patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestic untuk melakukan kegiatan eksploitasi ataupun eksplorasi dalam bidang pertambangan, sesuai dengan pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa kontrak karya merupakan sebuah perjanjian yang bersifat dinamis karena didalamnya terdapat beberapa yang dapat dinegoisiasi ulang seperti : Luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak dsb. Bentuk kontrak karya yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Perusahaan penanaman modal asing atau patungan (Joint venture) antara perusahaan asing dan Domestik bersifat tertulis.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan oleh Penulis dengan cara menganalisa data-data yang ada di internet dengan cara memahami dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Amerika dalam menangani Joint venture di PT. Freeport Indonesia.

Setelah dilakukan proses negoisiasi yang memakan waktu jangka panjang Pemerintah Indonesia lalu menemukan titik terang dari hasil negoisiasi antara Freeport dan Indonesia sesuai keinginan masing-masing aktor. Negoisiasi antara pemerintah dan Indonesia telah berlangsung beberapa tahun hingga tercapainya sebuah kesepakatan. Kerjasama ini Sampai Pada titik awal negoisiasi jadi kedua aktor Negara tersebut bersikap saling melawan hingga kesepakatan tidak tercapai jadi dalam perkembangan dan kebijakan bahwa negoisiasi panjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah sampai saat ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik hal ini juga dapat menjadi acuan jalannya perekonomian Indonesia, negoisiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Freeport pada era Presiden Jokowi lebih bersifat efektif karena dapat memberi keuntungan yang sangat besar kepada kedua belah pihak. Bagi Indonesia sendiri bahwa hasil yang didapat sesuai dengan harapan yang meliputi kepemilikan saham mayoritas, fasilitas smelter, peningkatan pemasukan. Jadi Kepemilikan saham dapat mempengaruhi peran Indonesia dalam aktivitas pertambangan Freeport dalam hal pengaturan manajemen, dividen, dan kontrol. Pendapatan dan peningkatan pemasukan bagi Pemerintah Indonesia akan terwujud melalui peningkatan pemasukan pajak, royalti, dividen, dan pemasukan melalui BUMN yaitu PT. Freeport. Bagi Freeport itu sendiri hasil yang diharapkan adalah adanya kepastian usaha yang didapat melalui perpanjangan kontrak.

Negoisiasi antara pemerintah dan Indonesia telah berlangsung beberapa tahun hingga tercapainya sebuah kesepakatan. Kerjasama ini Sampai Pada titik awal negoisiasi jadi kedua aktor Negara tersebut bersikap saling melawan hingga kesepakatan tidak tercapai jadi dalam perkembangan dan kebijakan bahwa negoisiasi panjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah sampai saat ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik hal ini juga dapat menjadi acuan jalannya perekonomian Indonesia, negoisiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Freeport pada era Presiden Jokowi lebih bersifat efektif karena dapat memberi keuntungan yang sangat besar kepada kedua belah pihak. Bagi Indonesia sendiri bahwa hasil yang didapat sesuai dengan harapan yang meliputi kepemilikan saham mayoritas, fasilitas smelter, peningkatan pemasukan. Jadi Kepemilikan saham dapat mempengaruhi peran Indonesia dalam aktivitas pertambangan Freeport dalam hal pengaturan manajemen, dividen, dan kontrol. Pendapatan dan peningkatan pemasukan bagi Pemerintah Indonesia akan terwujud melalui peningkatan pemasukan pajak, royalti, dividen, dan pemasukan melalui BUMN yaitu PT. Freeport. Bagi Freeport itu sendiri hasil yang diharapkan adalah adanya kepastian usaha yang didapat melalui perpanjangan kontrak. Jadi dalam kasus negoisiasi pemerintah melakukan pengalihan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, implementasi yang paling penting dalam pembentukan bargaining power menurut tulisan ini adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Penulis menyimpulkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu sumber FDI terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung di Indonesia, seperti investasi di sektor migas, pertambangan, perbankan dan investasi, perhotelan, dan farmasi. Sementara itu di pasar modal Indonesia dari beberapa total investor asing yang tercatat di bursa asing di Indonesia 9% berasal dari

Amerika Serikat. Maka untuk menstabiliskan saham dan pendapatan Negara pemerintah harus dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti yang diperoleh dari investasi Amerika Serikat ke Indonesia. Maka dari itu perlu ditinjau kembali mengenai peraturan pajak dan royalti atas investasi Amerika Serikat di Indonesia. Indonesia juga memeberikan Fasilitas yang ditujukan kepada investor besar yaitu dengan adanya orientasi jangka panjang berupa pembebasan dan pengurangan PPh Badan. Tetapi Indonesia membuat ketentuan yang telah disepakati Adapun syarat untuk mendapatkan fasilitas ini adalah: Pertama, merupakan industri pionir dan dengan prioritas tinggi dalam skala nasional. Kedua, memiliki rencana penanaman modal baru minimal Rp. 1 Triliun. Ketiga, harus menempatkan dana paling sedikit 10% dari total pendanaan pada perbankan di Indonesia.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa PT. Freeport berada di Indonesia sudah berada di Indonesia kurang lebih lima puluh tahun mulai era pemerintahan soerharto. PTFI telah memberikan beberapa kontribusi kepada Indonesia, salah satunya dari segi ekonomi, PTFI telah berkontribusi langsung sebesar US\$ 15,8 miliar dan US\$ 29,5 miliar melalui keuntungan tidak langsung. PT. Freeport juga berperan dalam pembangunan Papua. Sebelum tahun 1967, daerah Timika hanya berupa hutan belantara. Pada tahun 1970 Freeport bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang sekarang menjadi kota Timika. PTFI juga memberikan apresiasi terhadap masyarakat setempat dengan membantu kesejahteraan warga lokal dengan memberi sekitar 30.000 warga lokal pekerjaan di PTFI. Dengan berpedoman pada UU no.24 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Perpu No.1 tahun 2017. Hal-hal berkenaan dengan jumlah divestasi, kewajiban pemegang kontrak karya, dan hak pemegang kontrak karya yang tertuang dalam Perpu ini menjawab renegotiasi yang sempat diadakan bersama PTFI pada 2014 silam. Pemerintah mewajibkan pihak pemegang kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika masih ingin memperoleh izin ekspor, pihak tersebut harus memenuhi kewajiban pemegang IUPK. (Adimaja, 2010) pada saat pemerintahan Jokowi, pemerintah menegaskan bahwa saham 51% kepada Indonesia di PT. Freeport Indonesia adalah ketika pemerintah mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2014. Pada saat itu PT. Freeport sendiri tetap ingin disvestasi sebesar 30% dan kewajiban disvestasi itu hanya berlaku dan diwajibkan kepada izin usaha pertambangan khusus(IUPK). Seorang pengamat energy dari Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan bahwa pemerintah sudah terlambat mendapatkan keuntungan dari disvestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

PT. Freeport merupakan sebuah perusahaan Multinasional yang identik akan sengketyanya dengan Indonesia. CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tidak bersedia mengubah izinnya menjadi IUPK. Pihak Freeport keberatan dengan peningkatan nilai divestasi yang diatur dalam Perpu No.1 tahun 2017 karena mereka diminta membayar lebih tanpa ada jaminan ekspor jangka panjang dari pihak Indonesia. Dan pada saat kesepakatan itu dilakukan PT. Freeport bermaksud mengajukan arbitrase bila selama 120 hari masalah ini tidak diselesaikan. Menurut UU RI No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Mereka beranggapan kontrak karya yang telah ditandatangani pada tahun 1991 merupakan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan arbitrase pada pemerintah Indonesia. Pada kontrak tersebut, tertulis bahwa Freeport memiliki izin ekspor hingga tahun 2021 dan bisa diperpanjang hingga tahun 2041. Pemerintah berhak menentukan apakah KK hendak diperpanjang atau tidak. Apabila kerja sama diperpanjang, kerja sama tersebut harus berlandaskan peraturan yang berlaku dalam negara.Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan. Menurut Salim H.S(2017) kontrak karya adalah sebuah perjanjian yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing yang merupakan sebuah patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestic untuk melakukan kegiatan eksploitasi ataupun eksplorasi dalam bidang pertambangan , sesuai dengan pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa kontrak karya merupakan sebuah perjanjian yang bersifat dinamis karan didalamnya terdapat beberapa yang dapat dinegoisasi ulang seperti : Luas wilayah,tenaga kerja,royalty, masa kontrak dsb. Bentuk kontrak karya yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Perusahaan penanaman modal asing atau patungan (Joint venture) antara perusahaan asing dan Domestik bersifat tertulis.



## 5. SARAN

Penelitian ini diharapkan untuk dapat sebagai acuan bagi akademisi dan bagi Peneliti selanjutnya yang mempelajari mengenai Kerjasama Indonesia dan Amerika di PT. Freeport Indonesia dan memahami lebih jelas konsep dasar dalam melakukan Investasi Asing.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pratama, G., Setiawan, D., & Dabu, P. (2016). Kebijakan PT.Freeport. Jogjakarta.
- [2] Diyani, T. (2014). Paradigma baru kebijakan penanaman modal asing PT. Freeport Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). Ahmad, Redi. (2016) Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NKRI 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 13 No 3.
- [3] Setlight, M. M. M. (2015). Divestasi Kontrak Karya. Jurnal Hukum PRIORIS, 5(1), 19-30.
- [4] Abidin, R. F. (2018). Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indoneisa Dengan PT Freeport Indonesia). Al-Risalah, 14(01), 161-179.
- [5] CNN Indonesia. (2017) "Mencerna Euforia 'Tunduknya' Freeport Usai Drama Panjang", diakses pada 10 Oktober 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017083007294485-238270/mencerna-euforia-tunduknya-freeport-usai-drama-panjang>
- [6] Detik Finance. (2017) "Berdasarkan Kontrak, Freeport Harusnya Sudah Divestasi 51% Saham", diakses pada tanggal 14 oktober 2020 dari <https://finance.detik.com/energi/d3435162/berdasarkan-kontrakfreeport-harusnya-sudah-divestasi-51-saham>
- [7] PT. Freeport Indonesia. (2015) Warisan Kami Latar Belakang Sejarah PTFI, diakses pada tanggal 29 september 2020 dari <https://ptfi.co.id/id/about/our-heritage#&slider1=2>
- [8] Republika.com (2017) "Indonesia Tidak Mendapat Keuntungan Dari Kesepakatan Dengan Freeport, Ini Alasannya", diakses pada tanggal 05 November 2020 dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/29/ovfwqtindonesia-tidak-mendapat-keuntungan-dari-kesepakatan-denganfreeport-ini-alasannya>